

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Studi di PT BPR BANK Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**SALIM CANDRA SETYA**

**C100160131**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN  
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Studi di PT BPR BANK Boyolali)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

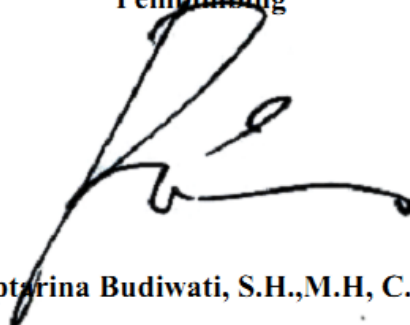
oleh:

**SALIM CANDRA SETYA**

**C100160131**

**Dosen**

**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written over the word 'Pembimbing'.

**(Septarina Budiwati, S.H.,M.H, C.N.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA**  
(Studi di PT BPR BANK Boyolali)

**OLEH  
SALIM CANDRA SETYA  
C100160131**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 25 Juni 2020  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Setarina Budiwati, S.H., M.H., C., N.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()

**Dekan,**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



**SALIM CANDRA SETYA**

**C100160131**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN  
KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Studi di PT BPR BANK Boyolali)**

**Abstrak**

Kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat berupa penyediaan uang yang mewajibkan pihak Peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam hal Perjanjian Kredit terdapat suatu Jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur. Jaminan tersebut berfungsi untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada Bank bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan problematika yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Hasil dari penelitian ini adalah konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Berkaitan dengan tanggung jawab hukum, para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Dan problematika yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah sering terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet.

**Kata Kunci:** kredit, tanggung jawab, jaminan fidusia

**Abstract**

Credit is a facility provided by the Bank to the public in the form of providing money that requires the Borrower to repay the debt after a certain period. In the case of a Credit Agreement there is a Guarantee given by the debtor to the creditor. This guarantee serves to provide confidence or certainty to the Bank that the debtor can repay his debt. This study aims to determine the legal construction of a credit agreement with fiduciary guarantees, the legal responsibilities of the parties in a credit agreement with fiduciary guarantees and the problems that exist in a credit agreement with fiduciary guarantees. The result of this research is the construction of a legal credit agreement with fiduciary collateral made in written form and has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in article 1320 of the Civil Code. In connection with legal responsibilities, the parties must exercise their rights and obligations as agreed in the agreement. And the problem in the credit agreement with fiduciary collateral is the frequent occurrence of problem loans or bad credit.

**Keywords:** credit, responsibility, fiduciary guarantee

**1. PENDAHULUAN**

Tidak dapat dipungkiri lagi pada era modern seperti ini bahwa meminjam uang, mengambil kredit atau berutang itu sudah menjadi kebiasaan atau gaya hidup saat ini. Kredit di era industrial sekarang ini merupakan suatu cara atau jalan pintas

bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Di Indonesia, terdapat sejenis bank yang ditujukan untuk melayani masyarakat kecil, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat mempunyai tugas memberikan layanan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan dana di pasar-pasar dan di desa-desa, serta mempunyai tugas untuk menghimpun dana tabungan masyarakat dalam bentuk deposito berjangka (Gazali & Usman, 2010).

Perjanjian kredit yang dilakukan antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur dalam pemberian kredit, akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Terjadinya perjanjian tersebut, maka lahirilah suatu hubungan antara para pihak yaitu kreditur dan debitur, dalam hal ini disebut perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian dalam bentuknya mempunyai arti suatu rangkaian perkataan yang menyimpan janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Subekti, 1963). Dalam praktik perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Namun ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit (Djumhana, 2006). Dalam

memberikan kredit, bank harus mengikuti tahap - tahap yang tepat sehingga terhindar dari kredit bermasalah, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar - benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam pemberian kredit yang sehat, dalam praktek setiap pemberian kredit Bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati - hatian yang dikenal dengan *The Five C's of Credit Analysis* (prinsip 5 C) (Mulyati dan Dwiputri, 2018).

bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan, dimana jaminan ini bukan hanya sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya, tetapi jaminan yang dapat dipergunakan sebagai jaminan pelunasan utang atau kredit tersebut (Mulyati dan Dwiputri, 2018). Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya tidak selalu suatu penyaluran kredit harus dengan jaminan kredit sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Hanya saja, suatu kredit dilepas tanpa agunan maka memiliki risiko yang sangat besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semua. Jika hal ini terjadi, pihak bank akan dirugikan sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah (Naja, 2005). Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang - Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberi kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Fungsi jaminan ini antara lain adalah sebagai pengaman apabila dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan (Diab, 2015). Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya

pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kerugian yang menunjukkan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan bank. Oleh, karena itu sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati – hatian (Bahsan, 2007).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat mengikat tiga rumusan masalah guna diababs dalam skripsi ini, yaitu : 1). Bagaimana konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ? 2). Bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia? 3). Bagaimana problematika yang ada alam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?.

Adapaun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu : 1. Tujuan penelitian skripsi ini yaitu : a). Mengetahui konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. b). Mengetahui tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. c). Mengetahui problematika yang ada dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. 2. Manfaat dari penelitian ini yaitu : a). Manfaat Teoritis, Menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum perdata, khususnya terkait tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. b). Manfaat Praktis, Memberikan gambaran kepada pembaca terkait dengan tanggung jawab hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia serta menjadi dasar acuan data untuk penelitan yang lebih lanjut dalam permasalahan yang sama.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu, pendekatan yuridis normative dan jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder berupa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali (PERSERODA), metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu Teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan serta peneliti juga melakukan wawancara di PT Bank Perkreditan



Rakyat Bank Boyolali (PERSERODA) dan metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Konstruksi Hukum Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia**

Berdasarkan data perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut penulis menganalisis bahwa konstruksi hukum dari perjanjian kredit tersebut adalah berbentuk tertulis yang dibuat dibawah tangan. Didalamnya terdapat isi berupa perjanjian kredit itu sendiri yaitu adanya peminjaman sejumlah uang yang diberikan bank selaku kreditur kepada nasabah selaku debitur. Dimana dalam perjanjian kredit tersebut terdapat dua pihak yang mempunyai hubungan hukum yaitu : Kreditur yaitu, PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA) yang beralamat di Jalan Merbabu 2B, Desa/ Kelurahan Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten/ Kota Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57311 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Santoso, S.H (bukan nama sebenarnya) selaku Pj. Kepala Bagian Kredit PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA). Serta Debitur yaitu, Siswanto umur (bukan nama sebenarnya) : 59 tahun, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di Perumahan Ngaru Aru Indah BLOK C 13 RT002 RW003 NGARU ARU BANYUDONO BOYOLALI.

Dimana dalam perjanjian kredit tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu : 1). Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam hal ini bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Adanya kesepakatan dalam perjanjian ini dibuktikan dengan para pihak yang menandatangani perjanjian kredit tersebut, yaitu Santoso,S.H selaku Pj. Kepala bagian Kredit PT BPR Bank Boyolali bertindak atas nama PT BPR Bank Boyolali memberikan pinjaman kredit kepada Siswanto selaku penerima pinjaman kredit. 2). Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku,orang – orang yang hendak melakukan perjanjian haruslah cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dianggap cakap dan berwenang melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, dimana dapat dikatakan dewasa apabila telah

berumur 21 Tahun dan/ atau sudah kawin. Dalam perjanjian kredit tersebut para pihak telah cakap dan berwenang dalam melakukan perbuatan hukum. Dimana Santoso, S.H selaku Pj. Kepala bagian kredit PT BPR Bank Boyolali secara sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA), sehingga telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan Siswanto atau debitur memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta dan telah berumur 59 tahun, serta memiliki hak milik atas kendaraan ditandai dengan kepemilikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan obyek yang dijadikan jaminan kredit tersebut. 3). Adanya obyek, Obyek perjanjian merupakan suatu prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Penyediaan uang atau tagihan sesuai yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah obyek dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit tersebut adalah berupa pemberian pinjaman uang yang diberikn PT BPR Bank Boyolali selaku kreditur kepada Siswanto selaku debitur sejumlah Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian kredit diatas. 4). Adanya Kausa yang halal, Berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang – undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Dalam perjanjian kredit tersebut yang menjadikan adanya kausa yang halal adalah dana pinjaman yang diberikan PT BPR Bank Boyolali selaku kreditur kepada Siwanto selaku debitur adalah untuk keperluan menambah modal usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Bank. Sehingga suatu sebab dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang – undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam perjanjian kredit tersebut pihak debitur sepakat untuk memberikan agunan kepada Bank berupa kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan berupa sepeda motor, merk Yamaha, tahun pembuatan 2014, warna kendaraan putih, nomor polisi AD 6510 AXD, nomor rangka MH31PA002EK444488, nomor mesin 1PA-444686, nomor BPKB BH786JIK543LLKN88 atas nama Siswanto. Dimana debitur dalam hal ini menyerahkan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) kepada PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA) sebagai obyek

jaminan fidusia. Yang mengakibatkan hak kepemilikan atas obyek jaminan fidusia ada pada PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA). Sehingga dengan jaminan berupa buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) tersebut pihak kreditur yaitu PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA) memiliki keyakinan akan pelunasan kredit yang diberikan kepada Siswanto selaku debitur. Berdasarkan penelitian dari penulis, Kreditur yaitu PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA) dan Siswanto selaku debitur telah sepakat untuk mengikatkan jaminan fidusia tersebut dengan pembebanan ditandai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh Notaris Kabupaten Boyolali, Nur Melia, S.H.,S.E.,M.Kn. Pada umumnya suatu jaminan, dalam hal ini buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sebagai obyek jaminan kredit harus dibebani dengan akta jaminan fidusia sesuai dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dimana dalam hal ini PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI (PERSERODA) selaku Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang telah melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian setelah dilakukannya pendaftaran maka akan melahirkan sertifikat jaminan fidusia, yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia sebagai bukti bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia. Sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

### **3.2 Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia**

Bahwa tanggung jawab hukum lahir setelah para pihak yaitu Bank selaku kreditur dan Siswanto selaku debitur menandatangani perjanjian kredit tersebut. Setelah ditandatanganinya perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia, oleh para pihak yang bersangkutan yaitu kreditur (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia), yang dibuat secara tertulis dan dihadapan notaris. Maka munculah tanggung jawab hukum bagi mereka yang bersangkutan. Tanggung jawab timbul dari perikatan, baik yang berasal dari undang – undang maupun perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, timbul hak dan kewajiban pada masing – masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak ini erat kaitannya dengan masalah

tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat. Dalam kaitanya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan terlihat adanya dua sisi tanggung jawab yaitu kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dan nasabah terhadap produk perbankan (Santoso, 2011).

Mengenai analisis tentang hak dan kewajiban kreditur, hak kreditur yaitu Bank Berhak menerima pelunasan pinjaman dana yang dipinjam oleh debitur, Bank berhak mendapatkan pembayaran biaya Provinsi, Bank berhak mendapatkan pembayaran biaya Administrasi, Bank berhak mendapatkan pembayaran biaya Asuransi Jiwa Kredit, Bank berhak mendapatkan pembayaran biaya Pengikatan Kredit dan Agunan, Bank berhak mendapatkan pelunasan Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir, Bank berhak melakukan tindakan hukum yang diperlukan apabila PEMINJAM dalam keadaan inkar janji, Apabila PEMINJAM terlambat membayar angsuran, Bank berhak mendapatkan biaya denda keterlambatan angsuran, Bank berhak menerima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bentuk jaminan dalam perjanjian kredit, Apabila ada pembayaran dari asuransi akan diterima oleh Bank untuk membayar jumlah seluruh hutang PEMINJAM, Bank berhak menagih kekurangan kepada ahli waris peminjam apabila terjadi kekurangan pembayaran, BANK berhak untuk mengalihkan piutang atau sisa kredit ini kepada pihak lain sesuai kepentingan BANK dengan persetujuan dari PEMINJAM, Bank berhak untuk melakukan sita jaminan terhadap barang yang dijadikan jaminan oleh debitur, serta berhak melelang barang tersebut apabila debitur melakukan wanprestasi sebagai bentuk pelunasan atas hutangna, Bank berhak dan mempunyai kuasa hak substitusi oleh debitur untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta jaminan fidusia. Sedangkan kewajiban kreditur yaitu, Bank berkewajiban memberikan dana pinjaman dalam bentuk kredit secara tunai, Bank berkewajiban mengikatkan jaminan dengan cara pembebanan jaminan fidusia terhadap obyek yang dijadikan

jaminan, Bank berkewajiban untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Mengenai analisis tentang hak dan kewajiban debitur, hak debitur yaitu, Berhak menerima pinjaman uang dalam bentuk kredit, Berhak mendapatkan pengembalian jaminan kredit berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) setelah melakukan pelunasan terhadap pinjaman yang diberikan kreditur. Sedangkan kewajiban debitur yaitu Berkewajiban membayar Biaya Bunga, Berkewajiban membayar biaya Provinsi, Berkewajiban membayar biaya Administrasi, Berkewajiban membayar biaya Asuransi Jiwa Kredit, Berkewajiban membayar biaya Pengikatan Kredit dan Agunan, Berkewajiban membayar pelunasan Sebelum Jangka Waktu Kredit Berakhir, Berkewajiban membayar seluruh biaya dimaksud Pasal 3 diatas menjadi beban dan harus dibayar oleh PEMINJAM, dan apabila ada biaya yang menjadi kewajiban PEMINJAM yang terlebih dahulu dibayar oleh BANK, maka dengan ini PEMINJAM memberikan kuasa mutlak kepada BANK untuk mendebet dari rekening di Bank dan/ atau membayar tunai sebagai penggantian seluruh biaya dimaksud, Berkewajiban membayar kembali pinjaman secara angsuran, Apabila PEMINJAM terlambat membayar angsuran sesuai kesepakatan diatas, PEMINJAM berkewajiban membayar denda keterlambatan angsuran, Bilamana barang agunan hilang, musnah, berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir penguasaan setela berlakunya perjanjian ini dan dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh pihak berwenang, maka PEMINJAM berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan lainnya yang nilainya oleh BANK dianggap cukup untuk melunasi hutang dan seluruh kewajiban PEMINJAM terhadap BANK, Berkewajiban memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik – baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas obyek jaminan tersebut.

### **3.3 Problematika yang Ada dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia**

Permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah terjadinya kredit bermasalah. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan*

merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak kembali tepat pada waktunya. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *nonperforming loan* tersebut apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Sedangkan menurut Veithzal kredit macet merupakan kesulitan nasabah di dalam penyelesaian kewajiban – kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, maupun pembayaran ongkos – ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* dalam perbankan dapat disebabkan oleh berbagai factor, misalnya kesengajaan dari pihak – pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh factor lain seperti factor makro ekonomi.

Tindakan yang paling mendasar dilakukan oleh bank adalah dengan penagihan intensif. Penagihan intensif dilakukan bank untuk dapat memaksimalkan dalam menyelamatkan kredit bermasalah sebelum akhirnya menjadi besar. Apabila tidak ada perbaikan dalam hal pembayaran angsuran kredit, pihak bank memberikan surat peringatan selama 3 kali. Jika upaya penagihan intensif tidak mampu untuk mengembalikan kredit bermasalah menjadi lancar maka upaya yang dilakukan dapat berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali). Jika upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali) masih mengalami kegagalan maka bank memiliki langkah dengan menjual agunan/jaminan. Agunan/jaminan yang diberikan nasabah kepada bank menjadi sumber kekuatan dalam melakukan upaya penyelesaian. Sebelum langkah ini ditempuh pihak bank juga telah melayangkan surat somasi pertama, apabila masih belum ada tindakan surat somasi kedua kemudian dilanjutkan dengan surat somasi ketiga. Penjualan agunan/jaminan terdiri dari dua cara yaitu, Penjualan agunan/jaminan dibawah tangan. Penjualan agunan/ jaminan dibawah tangan dilakukan terhadap debitur yang kooperatif terhadap kredit yang sedang bermasalah. Bank masih memberikan kesempatan kepada nasabah terhadap jaminan/agunan untuk menjualnya secara umum, Dan Penjualan agunan/jaminan dengan jalur lelang, langkah ini diambil setelah beberapa langkah diatas tidak mampu menyelesaikan kredit bermasalah.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Boyolali (PERSERODA) maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Bahwa konstruksi hukum perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut adalah berbentuk tertulis yang dibuat dibawah tangan. Didalamnya terdapat isi berupa perjanjian kredit itu sendiri yaitu adanya peminjaman sejumlah uang yang diberikan bank selaku kreditur kepada nasabah selaku debitur. Dimana dalam perjanjian kredit tersebut terdapat dua pihak yang mempunyai hubungan hukum yaitu kreditur dan debitur. Dalam perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek dan kausa yang halal. Setelah semua syarat sahnyanya perjanjian telah dipenuhi dalam perjanjian kredit tersebut, maka perjanjian kredit tersebut dapat berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang bersangkutan, sehingga perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sesuai dalam pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan penelitian dari penulis, Kreditur yaitu PT BPR BANK BOYOLALI (PERSERODA) dan Siswanto selaku debitur telah sepakat untuk mengikatkan jaminan fidusia tersebut dengan pembebanan. Hal tersebut dibuktikan dengan dibuatnya akta jamina fidusia oleh Notaris Boyolali Nur Melia, S.H.,S.E.,M.Kn. Serta PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BOYOLALI (PERSERODA) selaku Penerima Fidusia atau kuasanya telah melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia yang melahirkan sertifikat jaminan fidusia, yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia sebagai bukti bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia.

Bahwa tanggung jawab hukum para pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia tersebut lahir setelah para pihak yaitu Bank selaku kreditur dan Siswanto selaku debitur menandatangani perjanjian kredit tersebut. setelah di tandatanginya perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia, oleh para

pihak yang bersangkutan yaitu kreditur ( penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia), yang dibuat secara tertulis dan dihadapan notaris. Maka munculah tanggung jawab hokum bagi mereka yang bersangkutan. tanggung jawab timbul dari perikatan, baik yang berasal dari undang – undang maupun perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, timbul hak dan kewajiban pada masing – masing pihak. Dimana hak dan kewajiban para pihak telah tertuang pada pasal – pasal yang ada dalam perjanjian kredit yang telah mereka sepakati. Hak dan kewajiban para pihak ini erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.

Bahwa problemaika yang sering terjadi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah kredit bermasalah. Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau nonperforming loan tersebut apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet. Kredit macet dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor kesengajaan dan atau factor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah atau nonperforming loan dalam perbankan dapat disebabkan oleh berbagai factor, misalnya kesengajaan dari pihak – pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh factor lain seperti factor makro ekonomi. Tindakan yang paling mendasar dilakukan oleh bank adalah dengan penagihan intensif. Penagihan intensif dilakuakn bank untuk dapat memaksimalkan dalam menyelamatkan kredit bermasala sebelum akhirnya menjadi besar. Kemudian ada upaya rescheduling (penjadwalan kembali). Jika upaya rescheduling (penjadwalan kembali) masih mengalami kegagalan maka bank memiliki langkah dengan menjual agunan/jaminan. Sebelum langkah ini ditempuh pihak bank juga telah melayangkan surat somasi pertama, apabila masih belum ada tindakan surat somasi kedua kemudian dilanjutkan dengan surat somasi ketiga.

#### **4.2 Saran**

Kepada Pihak kreditur bahwasanya Dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia, Bank harus melaksanakan Hak dan Kewajibanya dengan



sebaik baiknya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, agar pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu masalah yang terjadi.

Untuk Nasabah selaku debitur bahwasanya Dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, nasabah harus benar benar memahami apa saja yang diperjanjikan. Serta harus melaksanakan hak dan kewajibannya selaku debitur dengan sabaik – baiknya, sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahsan, M. (2007). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Diab, Ashadi L. (2017). “*Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*”. *Jurnal Al-'Adl.Vol.10 No.1*, Januari 2017.
- Djumhana, Muhamad. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni S. & Usman, Rachmad. (2010). *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyati, Etty dan Dwiputri, Fajrina Aprilianti. (2018). “Prinsip Kehati - Hatian Dalam Menganalis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan”, *Jurnal hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018*.
- Naja, H.R. Daeng. (2005). *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Lukman AZ. (2011). *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustina.
- Subekti. (1963). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.